

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang masih berkembang, namun pembangunan-pembangunan yang dilakukan negeri ini cukup membuktikan bahwa Indonesia selalu mencoba untuk menjadi negara yang mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan bangsanya. Hal itu terangkum dalam visi dan misi dari pembangunan nasional untuk menciptakan bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Oleh karena itu, segala daya dan upaya pun selalu dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional) dimana mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Adisasmitha, 2006, p. 111). Dalam hal ini pembangunan dianggap sebagai suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dalam segala aspek di masyarakat dan pada pelaksanaannya diperlukan pemahaman hingga perencanaan yang matang. Salah satu tujuan adanya pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut mengakibatkan pembangunan selalu dituntut untuk menghasilkan pembangunan yang merata.

Pembangunan yang sangat gencar dilakukan saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan infrastruktur dianggap

sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik yaitu tenaga listrik, telekomunikasi, sanitasi, pembuangan dan gas. Kemudian yang termasuk pekerjaan umum yaitu jalan, bendungan, irigasi, drainase dan proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan (Pamungkas, 2009, p. 4).

Setiap pembangunan yang datang dari program-program pemerintah biasa disebut pembangunan konvensional. Namun aspek yang dituju pemerintah dalam pembangunan konvensional ini adalah ekonomi. Pembangunan konvensional berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan, sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting (Azis dkk., 2010: 22).

Ketika pembangunan hanya bertujuan untuk pemenuhan ekonomi nasional, maka akan berdampak pada aspek lainnya sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan, padahal dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi :

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka strategi yang dibutuhkan dalam pembangunan mengacu pada beberapa hal yang diantaranya harus mampu melihat jauh ke depan sehingga setiap tindakan yang akan dilakukan saat ini dapat diestimasi permasalahan yang akan muncul di masa depan, kemudian peranan dimensi ruang dan waktu dimana keduanya akan berhasil jika didukung oleh sosial budaya dan antisipasi perubahan yang akan terjadi di masyarakat.

Jatinangor merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Sumedang. Sebagai daerah berkembang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, wilayah Jatinangor ini kadang sering dianggap sebagai bagian dari daerah Bandung. Tidak heran, jika selama ini banyak warga dari luar daerah yang mengira kalau Jatinangor itu masuk wilayah Bandung. Sebab, di antara daerah-daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, Jatinangor ini memang menjadi daerah yang paling cepat pertumbuhan ekonominya.

Pada tahun 1980 Jatinagor ditetapkan sebagai kota pendidikan tinggi sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. kawasan kota yang dipadati oleh kawasan terbangun dan struktur binaan. Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub-pusat (sub-centre) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu: Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM).

Sisi positif dari kehadiran universitas-universitas di kawasan Jatinangor ini adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar yang tumbuh pesat. Menjamurnya usaha kos-kosan sampai dengan apartemen dan tempat-tempat makan yang biasanya hanya ada di kota-kota besar menambah semarak suasana Jatinangor sebagai kawasan pendidikan yang asri tetapi tetap “gaul”.

Urbanisasi adalah proses yang mengarah pada pertumbuhan kota karena industrialisasi dan pembangunan ekonomi, dan yang mengarah pada perubahan khusus perkotaan dalam spesialisasi, pembagian kerja, dan perilaku manusia. Dengan demikian, urbanisasi adalah kekuatan dan pergerakan demografis yang tak terelakkan dan proses ini tentu tidak boleh diabaikan. Studi sebelumnya bekerja terutama pada satu bidang seperti pembangunan, kependudukan dan lingkungan. Penelitian ini difokuskan pada implikasi urbanisasi terhadap pemukim di Jatinangor yang studi ini relevan dengan ekonomi Indonesia dan akan memberikan kesempatan kepada penduduk Jatinangor untuk meningkatkan manajemen dan strategi operasi mereka. Menurut De Wang (1999) proses urbanisasi dapat berupa transformasi wilayah pedesaan menjadi perkotaan. Proses ini dapat dibagi menjadi dua kategori: satu dari kota dan satu lagi dari penyebaran industri perkotaan ke daerah luar dan pembangunan perusahaan milik negara dan proyek-proyek utama.

Program-program ini membawa banyak perubahan budaya dan sosial di kalangan pemukim Jatinangor. Le Van Thanh (2007) menyatakan bahwa urbanisasi terjadi berdasarkan perubahan sosial di kota, perkembangan ekonomi yang pesat dan perubahan perilaku masyarakat. Untuk menghadapi beberapa tantangan, sebagian besar pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan situasi. Baru-baru ini, perencanaan kota telah dipandang sebagai alat penting untuk kebijakan pengelolaan kota. Lee Van Thanh (2007) menemukan bahwa meskipun ada lebih banyak kesempatan kerja di distrik yang sangat urban, semua pekerjaan membutuhkan mereka dengan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang lebih tinggi. Persaingan kerja juga lebih tinggi karena tingkat urbanisasi. Menurut M. Tayfun Turan dan Asli Besirli (2008), urbanisasi dipandang sebagai proses lama dan terbentuk secara paralel dengan industrialisasi, reformasi teknologi dan layanan infrastruktur di negara-negara maju. Sementara itu, proses ini lebih baru dan telah dialami dengan cepat dalam waktu singkat untuk negara-negara berkembang dan terbelakang. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja baru di perkotaan. Selain itu, orang suka bermigrasi ke kota karena mereka dapat memperoleh gaji yang lebih besar dan mencapai status yang lebih tinggi daripada orang tua mereka (Ashraf Ragab El-Ghannam, 2001). Pemukim dan generasi keduanya pindah ke pusat kota untuk menemukan peluang ekonomi yang lebih baik. Industrialisasi dan pergeseran selanjutnya dari pekerjaan pertanian ke pekerjaan pabrik membuat perusahaan menguntungkan untuk menempatkan pabrik mereka di kota-kota besar dengan banyak pekerja lokal. Seringkali terjadi kekurangan sumber daya yang parah di daerah pedesaan, seperti teknologi medis,

yang selanjutnya mendorong orang ke kota. Di negara berkembang, seperti di Afrika, peningkatan populasi alami dan migrasi menjadi faktor besar dalam urbanisasi. Orang-orang didorong keluar dari kemiskinan pedesaan dan masuk ke daerah perkotaan karena mereka kurang mampu merawat keluarga mereka yang sedang tumbuh; kota menawarkan pekerjaan, makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Faktor demografi meliputi laju pertumbuhan penduduk alam yang berhubungan dengan laju tahunan pertumbuhan penduduk ukuran keluarga, laju fertilitas total, ketergantungan usia dan migrasi. Hal ini didukung oleh Ashraf Ragab El-Ghannam (2001) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara tingkat perubahan penduduk perkotaan, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk urbanisasi pada masyarakat Arab. Urbanisasi membuat orang bergantung pada orang lain untuk kebutuhan dasar; penduduk kota harus bergantung pada pedalaman pedesaan untuk produksi pertanian, misalnya, karena penduduk kota tidak memiliki cukup lahan untuk menanam makanan mereka sendiri. Penduduk kota mengalami degradasi psikologis yang berasal dari ketergantungan pada orang lain untuk menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari transportasi, pendidikan, hingga hiburan. M. Tayfun Turan dan Asli Besirli (2008) menemukan bahwa masalah sosial yang terkait dengan masyarakat perkotaan, masalah lalu lintas dan kecemasan umum tentang masa depan berkontribusi pada peningkatan gangguan kesehatan mental.

Dalam studi lain, dampak negatif urbanisasi berdampak psikologis. Sebagian besar orang berpikir bahwa kota-kota besar membawa ketegangan daripada kebahagiaan. Perbedaan gaya hidup antara daerah terlantar dan daerah

tujuan muncul sebagai konflik budaya. Beberapa model yang menjelaskan hubungan antara kesehatan mental dan imigrasi ke kota dan lingkungan disajikan. Salah satunya adalah model yang dijelaskan oleh Chu et al. Model tersebut mengandung lima komponen yang mempengaruhi status kesehatan. Ada kontrol atas lingkungan internal, desain rumah dan kualitas perawatan, peluang melarikan diri yang penting, kejahatan dan kejahatan ketakutan dan partisipasi sosial. Selain itu, urbanisasi memiliki banyak efek buruk pada struktur masyarakat sebagai konsentrasi raksasa orang bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Pembangunan perumahan yang cepat menyebabkan kepadatan penduduk dan daerah kumuh, yang mengalami masalah besar seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, pengangguran dan tingkat kejahatan yang tinggi. Selain itu, tekanan pada sumber daya alam yang penting, seperti pasokan air, menyebabkan harga yang lebih tinggi dan masalah kelestarian lingkungan secara umum.

Sebagai kota suburban yang menyangga Kota Bandung, Jatinangor merupakan tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai daerah. Demikian karena di Jatinangor terdapat universitas-universitas berskala nasional seperti: Universitas Padjadjaran, ITB, Ikopin dan IPDN. Oleh karena itu, tidak heran jika kota ini menjadi hidup, sehari-harinya sangat sibuk dengan berbagai aktivitas. Untuk menyangga kehidupan yang ramai itulah, banyak orang yang datang (pendatang) dari belahan kota atau desa lain. Masalah perumahan, kebersihan, dan keamanan dapat menjadi masalah yang terus-terusan muncul di Jatinangor. Dengan itu pulalah adalah menarik apabila diteliti kajian tentang permasalahan urbanisasi di Jatinangor. Oleh karenanya penulis mengajukan judul, "**Urbanisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat Kota (Kajian di Jatinangor Kabupaten Sumedang).**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, teridentifikasi beberapa masalah yang muncul dari urbanisasi yang ada di Jatinangor, yaitu:

1. Kepadatan penduduk 500 orang atau lebih per kilometer persegi.
2. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25 persen atau kurang.
3. Dalam hal lingkungan sosial, banyaknya pendatang telah banyak membuat terjadinya perombakan dalam bidang perumahan.
4. Dalam hal kebersihan, banyaknya pendatang tentu telah membuat kondisi kota menjadi kurang diperhatikan, apalagi masing-masing orang berbuat sesuai kemauan mereka saja.
5. Dalam hal keamanan, banyaknya pendatang tentu akan membuat kondisi lingkungan kurang aman, karena akan banyak terekspos harta kekayaan yang merupakan penunjang kehidupan seperti kendaraan bermotor. Hal ini akan mengundang kejahatan dari luar kota tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan judul penelitian yang dipilih, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan masyarakat sebelum dan sesudah urbanisasi di Jatinangor?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadi perubahan sosial di Jatinangor?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Jatinangor untuk meningkatkan keadaan sosial yang lebih baik?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadaan masyarakat sebelum dan sesudah urbanisasi di Jatinangor.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mendorong terjadi perubahan sosial di Jatinangor.
3. Untuk menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Jatinangor untuk meningkatkan keadaan sosial yang lebih baik.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Praktis**

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, Masyarakat, baik pribumi maupun pendatang, untuk menambah pengetahuan tentang kajian permasalahan perpindahan, pentingnya mencegah dampak- dampak buruk dari perpindahan penduduk, dan untuk dapat hidup dengan lebih baik.

##### **2. Kegunaan Akademis.**

Yaitu, bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan perpindahan, khususnya yang berkaitan dengan dampak keberadaan para pekerja pendatang, serta untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep perpindahan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kajian tentang perubahan sosial telah menjadi pokok bahasan penting dalam Sosiologi. Pada akhir abad ke-19, ketika evolusi menjadi model utama untuk memahami perubahan biologis, gagasan perubahan sosial mengambil peran evolusioner, dan, meskipun model lain telah menyempurnakan gagasan modern tentang perubahan sosial, evolusi tetap bertahan sebagai prinsip yang mendasarinya (Rahman, 2011: 97).

Model sosiologis lainnya menciptakan analogi antara perubahan sosial dan kemajuan teknologi Barat. Pada pertengahan abad ke-20, para antropolog meminjam dari teori linguistik strukturalisme untuk menguraikan pendekatan perubahan sosial yang disebut fungsionalisme struktural. Teori ini mendalilkan keberadaan institusi dasar tertentu (termasuk hubungan kekerabatan dan pembagian kerja) yang menentukan perilaku sosial. Karena sifatnya yang saling terkait, maka perubahan pada satu institusi akan berdampak pada institusi lainnya (Rahman, 2018: 48).

Dalam perpindahan penduduk, selain karakteristik pendatang berupa usia, pendidikan, status perkawinan dan pendapatan, faktor-faktor yang ada di daerah asal dan daerah tujuan juga memengaruhi keputusan pendatang untuk berpindah. Faktor-faktor yang ada di daerah asal menjadi faktor pendorong (*push factors*), sedangkan faktor-faktor yang ada di daerah tujuan merupakan faktor penarik (*pull factors*). Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lainnya. Keberadaan pendatang terdahulu sebagai jaringan sosial pendatang baru juga memengaruhi keputusan berpindah, di mana

keberadaan jaringan sosial ini dikategorikan sebagai faktor penarik pindah.

Banyak faktor yang mempengaruhi migrasi yang cukup sulit untuk diprediksi. Sementara perkembangan sosial, politik dan ekonomi sangat sulit diprediksi secara tepat, penilaian dapat dibuat berdasarkan situasi saat ini. Gangguan ekologis lebih mudah dihindari karena ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa faktor ini akan menjadi penyebab kekhawatiran dalam waktudekat. Pemodelan lingkungan, serta memburuknya keamanan pangan dan air di banyak negara, menunjukkan bahwa masalah ekologis sudah mulai menghadirkantantangan secara global. Faktor ekologis memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang semakin signifikan yang mempengaruhi migrasi selama abad ke-21.

Migran sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori besar: kemanusiaan dan ekonomi. Migran kemanusiaan termasuk pencari suaka dan pengungsi. Orang-orang ini umumnya bermigrasi ke negara-negara yang secara geografis dekat dengan negara asal mereka. Selama dekade terakhir, Afghanistan telah menjadi sumber utama emigran kemanusiaan, dengan Pakistan dan Iran menjadi negara tujuan utama mereka (UNHCR, 2013: 13). Migran ekonomi, di sisi lain, bermigrasi untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan keadaan keuangan mereka. Di masa lalu, para migran ini umumnya pindah dari negara yang lebih miskin ke negara kaya, namun, bukti baru-baru ini menunjukkan bahwa ini mulai berubah dengan meningkatnya tingkat migrasi selatan-selatan dan sirkular.

Faktor pendorong sosial dapat mencakup penganiayaan etnis, agama, ras, dan budaya. Peperangan, atau ancaman konflik, juga merupakan faktor

pendorongutama. Dalam konteks Australia, sebagian besar pencari suaka yang datang dengan perahu dalam dekade terakhir datang dari Afghanistan, Iran, Irak dan Sri Lanka. Semua negara ini, selain Iran, telah mengalami konflik yang sangat tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, meski bebas dari konflik kekerasan, Iran memiliki salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di dunia yang menyebabkan banyak warganya mencari suaka di luar perbatasannya.

Politisasi identitas keagamaan dan etnis berpotensi menyebabkan tingkat konflik yang signifikan di dalam negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami transisi politik dari pemerintahan otoriter ke demokrasi berada pada risiko instabilitas dan konflik internal yang lebih besar (Living Reviews, 2009). Seringkali negara-negara ini tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi dengan baik ketidakstabilan sosial. Beberapa negara di Wilayah Samudera Hindia (Indian Ocean Region –IOR), termasuk Burma, yang baru-baru ini mulai mengalami demokratisasi namun gagal secara bersamaan mengembangkan identitas nasional bersama yang mampu mengikat bersama berbagai kelompok dalam perbatasan mereka. Di negara-negara yang secara sosial beragam potensi konflik mungkin lebih besar daripada di masyarakat yang lebih homogen atau inklusif. Tingkat migrasi di masa depan dari negara-negara ini sepenuhnya tergantung pada umur panjang dan tingkat keparahan konflik yang dapat timbul dari keluhan sosial.

Kemajuan teknologi, baik dalam komunikasi dan transportasi, di samping liberalisasi pasar tenaga kerja, memiliki potensi untuk meningkatkan

tingkat migrasi sirkuler. Bentuk migrasi ini terjadi ketika individu bermigrasi dari Negara asal ke Negara tujuan pada beberapa kesempatan terpisah (Hugo, 2013: 2). Secara umum, kekuatan ekonomi memotivasi individu untuk pindah ke negara-negara di mana prospek pekerjaan lebih baik sebelum kembali ke negara asal mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa migrasi sirkuler dapat memiliki hasil pembangunan yang positif. Yang paling penting, para migran sirkuler lebih cenderung mengirim uang kembali yang lebih besar ke negara asal mereka daripada mereka yang menetap secara permanen di negara tujuan mereka. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan migrasi orang pandai (*brain drain*) dan pengosongan tenaga kerja sebagian besar dapat dihindari (Hugo, 2013: 6). Masalah eksploitasi masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan standar dapat diadopsi untuk melindungi hak-hak migran sirkuler.

Migran ekonomi memiliki tingkat pilihan yang lebih besar dalam menentukan tujuan mereka daripada migran kemanusiaan. Banyak pencari suaka akan melarikan diri ke negara aman terdekat yang akan menerima mereka sedangkan migran ekonomi akan pindah ke negara-negara yang membutuhkan keterampilan mereka atau memiliki kondisi yang lebih baik daripada negara asal mereka. Oleh karena itu, faktor penarik di negara tujuan lebih mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan para migran ekonomi.

Dari faktor-faktor ekologis yang mendorong individu untuk bermigrasi, perubahan iklim bisa dibilang paling serius. Selama dekade berikutnya, perubahan iklim berpotensi untuk mengintensifkan dampak dari faktor-faktor

pendorong sosial, politik dan ekonomi. Bahkan jika individu yang terkena dampak perubahan iklim hanya bergerak jarak pendek, hal ini berpotensi mengubah dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemungkinan masalah sosial yang timbul meningkat ketika kelompok suku, etnis dan agama yang secara historis terpisah terpaksa berbaur karena negeri tradisional tidak lagi dapat mendukung pemukiman manusia. Individu yang terlibat dalam pertanian, misalnya, dapat dipaksa untuk mencari bentuk pekerjaan alternatif karena tanah mereka tidak lagi mampu menghasilkan atau mempertahankan jumlah barang yang layak. Harga makanan dan air cenderung meningkat di sebagian wilayah karena kelangkaan sumber daya yang lebih besar. Beban-beban ini menempatkan tekanan tambahan pada kapasitas negara untuk memastikan kesejahteraan bagi semua dan, dalam beberapa kasus, menjaga stabilitasnya.

Dampak yang dapat diamati dari perubahan iklim cenderung menjadi lebih jelas selama dekade berikutnya. Negara harus memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan peningkatan arus migrasi yang akan menjadi konsekuensi dari gangguan yang tak terhindarkan yang akan terjadi selama abad berikutnya. Perubahan iklim akan berdampak pada sumber daya air, pertanian, keamanan pangan, kesehatan masyarakat dan, dalam beberapa kasus, mengancam keberadaan beberapa negara. Dampak perubahan iklim akan sangat nyata di negara-negara berkembang yang tidak memiliki sarana yang cukup untuk mengatasi, atau beradaptasi dengan, lingkungan yang berubah.

Keamanan pangan dan air diperkirakan akan menjadi isu yang lebih menonjol selama beberapa dekade mendatang. Laporan Panel Antarpemerintah

tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memiliki dampak terbesar pada ketahanan pangan pada pertengahan abad ini. Daerah yang tidak bisa lagi mempertahankan pertanian cenderung mengalami migrasi dari desa ke kota atau, dalam beberapa kasus, peningkatan tingkat emigrasi internasional. Faktor lain yang dapat memperburuk kerawanan pangan adalah keamanan air. Peningkatan kerawanan air di beberapa bagian Wilayah Samudera Hindia, khususnya, berpotensi untuk memengaruhi migrasi internasional.

Individu yang sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi ekologi dapat memilih untuk bermigrasi dari negara asal mereka untuk mencari kondisi lingkungan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Mereka yang memilih untuk berhijrah karena bencana alam yang lebih sering atau lebih merusak dapat diidentifikasi sebagai pengungsi iklim dan mencari suaka di negara lain yang tidak terlalu terpengaruh oleh iklim ekstrem. Pengungsi iklim didefinisikan sebagai 'orang yang harus meninggalkan habitat mereka segera atau dalam waktu dekat, karena perubahan mendadak atau bertahap di lingkungan alam mereka terkait dengan setidaknya satu dari tiga dampak perubahan iklim: kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan kekeringan dan kelangkaan air.' Definisi ini, bagaimanapun, tidak memiliki kedudukan dalam hukum dan organisasi pengungsi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang lebih suka menggunakan istilah migran lingkungan. Khawatir bahwa sekarang sudah terlambat untuk mengambil tindakan untuk mencegah perubahan iklim, komunitas internasional sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk adaptasi.

Di sini migrasi lingkungan merupakan salah satu langkah adaptasi yang harus dipertimbangkan lebih besar oleh komunitas internasional.

Meningkatnya tingkat intoleransi, kesenjangan ekonomi antar negara, serta ancaman perubahan iklim dan dampak terkaitnya, semuanya merupakan faktor kunci yang mendorong perpindahan imigrasi dan populasi. Di sini akan dilihat faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan populasi dan urbanisasi.

Hal-hal yang demikian di atas tentang perpindahan antar Negara dapat dianalogikan pada perpindahan dari daerah perdesaan ke perkotaan (urbanisasi). Namun demikian, setelah kedatangan para pendatang baru, kota pun mengalami permasalahan-permasalahan sosial.

Migrasi juga dapat memengaruhi persepsi risiko dan perilaku berisiko. Perasaan kehilangan dan masalah psikososial terkait dengan posisi sosial yang lebih rendah, pengangguran dan berada dalam minoritas dapat menyebabkan perasaan kurangnya hubungan antara perilaku berisiko saat ini dan efek kesehatan di masa depan (mis. Migran mungkin dipaksa untuk fokus pada perasaan mereka saat ini daripada dari dampak kesehatan masa depan). Sebagai contoh, seorang migran baru, terpisah dari teman-teman dan keluarga di lingkungan perkotaan (merasa lebih anonim dan kurang dibatasi oleh norma-norma sosial) dapat beralih ke prostitusi atau narkoba sebagai cara untuk melepaskan diri dari kesepian, frustrasi, dan isolasi sosial.

Migrasi juga memiliki implikasi kesehatan bagi negara yang ditinggalkan oleh para migran. Individu yang berhijrah ke peluang ekonomi



dapat menyebabkan '*brain drain*' di negara asalnya, ketika sejumlah besar individu dengan keterampilan teknis atau pengetahuan pergi, berpotensi menipisnya infrastruktur lokal. Ini khususnya memengaruhi layanan kesehatan karena sering kali ada insentif ekonomi bagi tenaga kesehatan untuk bermigrasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mengakui bahwa migrasi tenaga kesehatan dari negara berkembang ke negara maju meningkatkan ketidakseimbangan yang ada dalam tenaga kesehatan global dan dapat menyebabkan kekurangan dalam penyediaan layanan lokal di negara berkembang memperkirakan bahwa 23% dokter Amerika menerima pelatihan medis mereka di luar AS. Mayoritas dokter terlatih asing (64%) di AS berasal dari negara berpenghasilan menengah atau rendah. Di Inggris, 31% dokter dan 13% perawat dilahirkan di luar negeri (Glover et al, 2001). Sementara negara-negara asal dapat mengambil manfaat dari beberapa pengiriman uang (mis. Upah migran yang dikirim kembali), implikasi yang merugikan bagi negara-negara berkembang jauh lebih besar daripada manfaat yang relatif kecil ini. Untuk mengatasi masalah *brain drain*, Pang (2002) merekomendasikan "perspektif global, prinsip etika yang disepakati antar negara, dan pendekatan sistematis dengan menggunakan kekuatan penyelenggaraan organisasi internasional."

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan 'struktural fungsional' merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau 'analisa sistem'

padaprinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.<sup>8</sup> Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwamasyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi

sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar, sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemenlemen yang memebentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai

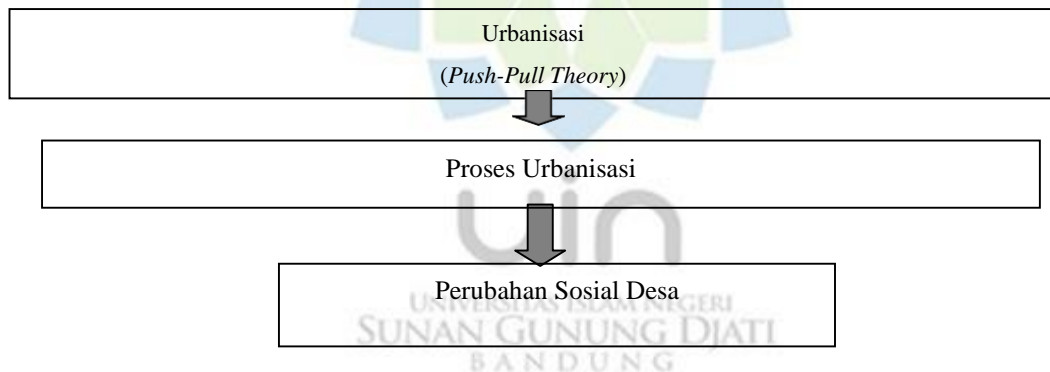
suatu sistem.

4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.

Melihat kondisi dunia di atas, hal-hal di atas pun boleh jadi terjadi juga di Jatinangor sebagai salah satu kota di wilayah Bandung Raya yang menjadi salah satu tujuan masyarakat perdesaan untuk tinggal di sana.

Selanjutnya dapat dikemukakan kerangka pemikiran skripsi dengan gambar berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG